

Gerakan Mahasiswa Indonesia Pasca-Reformasi 1998: Tantangan, Peluang, Dan Strategi Reorientasi

*Muhamad Chaerul Rahman¹, Khairi Ananda Jasoft², Muhammad Aufal Syahrul Abror³,
Ahmad Maftuh Sujana⁴*

^{1,4} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹mchaerulr23@gmail.com, ²khairiananda8@gmail.com, ³aufalabr707@gmail.com,

⁴maftuhsujana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan gerakan mahasiswa Indonesia pasca-Reformasi 1998 dengan menyoroti dinamika tantangan, peluang, dan strategi reorientasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka, data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah untuk menggambarkan respons mahasiswa terhadap perubahan sosial-politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa meski ruang partisipasi politik semakin terbuka, gerakan mahasiswa menghadapi disorientasi ideologis, lemahnya sistem kaderisasi, dan terbatasnya basis kajian lapangan yang memengaruhi efektivitas aksi kolektif. Sementara itu, peluang terbentang lewat inovasi strategi—misalnya kolaborasi lintas organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi—yang dapat memperkuat konsolidasi dan daya kritis mahasiswa. Diskursus pembahasan menekankan pentingnya reorientasi program gerakan menuju agenda kolektif berbasis data akurat, penguatan solidaritas antardaerah, serta tradisi komunikasi tanpa prasangka untuk merespon isu nasional dan lokal secara komprehensif. Kesimpulannya, gerakan mahasiswa masih memiliki potensi sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, namun memerlukan pembaruan ideologis dan strategis agar mampu memainkan peran moral dan politik yang lebih adaptif di era demokrasi kontemporer.

Kata Kunci : Gerakan Mahasiswa, Pasca-Reformasi 1998, Tantangan, Peluang, Strategi Reorientasi

Abstract

This study explores the development of the Indonesian student movement after the 1998 Reform by highlighting the dynamics of challenges, opportunities, and reorientation strategies. Through a descriptive qualitative approach and literature study, data was collected from a variety of literature such as books, journals, and scientific articles to describe students' responses to socio-political changes. The results of the analysis show that although the space for political participation is increasingly open, the student movement faces ideological disorientation, weak cadre systems, and limited field study bases that affect the effectiveness of collective action. Meanwhile, opportunities lie through strategic innovation—such as cross-organizational collaboration and the use of information technology—that can strengthen students' consolidation and critical thinking. The discussion discourse emphasized the importance of reorienting the movement's programs towards a collective agenda based on accurate data, strengthening solidarity between regions, and a tradition of communication without prejudice to respond comprehensively to national and local issues. In conclusion, the student movement still has the potential to be an agent of social change and control, but it requires ideological and strategic renewal in order to be able to play a more adaptive moral and political role in the era of contemporary democracy..

Keywords : Student Movement, Post-Reform 1998, Challenges, Opportunities, Reorientation Strategy

Pendahuluan

Setiap fase dalam perjalanan sejarah suatu bangsa selalu ditandai oleh lahirnya generasi yang membawa semangat dan pola gerakan tertentu. Dalam konteks Indonesia, sejarah telah mencatat peran penting generasi pemuda dalam setiap momentum perubahan sosial-politik. Dimulai dari generasi 1908 yang memperkenalkan gagasan kebangkitan nasional, disusul oleh generasi 1928 yang mengikat identitas kebangsaan melalui Sumpah Pemuda, hingga generasi 1945 yang menjadi motor utama kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, generasi 1966 menyuarakan aspirasi rakyat melalui Tritura, dan generasi 1998 mengambil peran signifikan dalam perjuangan menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam setiap momentum perubahan tersebut, pemuda—terutama mahasiswa—selalu tampil sebagai aktor utama yang berada di garis depan. Dominasi peran pemuda dalam proses transformasi sosial tidak dapat dilepaskan dari semangat idealisme yang menjadi karakter inheren mereka. Keterkaitan erat antara pemuda dan idealisme menjadikan kontribusi mereka bersifat konsisten dan berkesinambungan dalam mendorong kemajuan bangsa (Purba, 2018:141).

Keberlanjutan suatu bangsa bergantung pada kualitas generasi mudanya. Jika generasi muda mengalami kemunduran, maka masa depan bangsa pun berada dalam bahaya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas strategis dalam perumusan kebijakan nasional. Tantangan global yang kompleks menuntut peran aktif pemuda di berbagai sektor—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial dan keagamaan (Ways, 2016:190).

Dalam satu abad terakhir sejak kebangkitan nasional, dunia mengalami perubahan drastis, terutama melalui pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis: sejauh mana pemuda, khususnya mahasiswa, mampu berkontribusi dalam proses pembangunan bangsa? Apa peran konkret yang dapat mereka ambil dalam dinamika nasional saat ini? Dan apakah gerakan mahasiswa masih memiliki relevansi dalam konteks masyarakat informasi yang serba cepat dan digital? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini secara khusus membahas perkembangan gerakan mahasiswa pasca-Reformasi 1998, merefleksikan peran mereka dalam sejarah pergerakan nasional, serta mengevaluasi tantangan kontemporer yang dihadapi mahasiswa. Diskursus ini juga mengkaji apakah mahasiswa masih layak menyandang predikat sebagai *agent of change* dan *agent of social control* di tengah arus informasi dan dinamika politik yang terus berubah..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-politik yang terjadi, khususnya mengenai

gerakan mahasiswa di era reformasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan dinamika sosial secara kontekstual dan komprehensif. Dalam hal ini, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menelaah dan menggambarkan secara sistematis bagaimana mahasiswa merespons perubahan sosial, serta tantangan dan peluang yang muncul pasca Reformasi 1998 (Sugiyono 2016:15-16)

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik gerakan mahasiswa. Studi pustaka menjadi metode utama karena sumber data yang digunakan sepenuhnya berasal dari referensi tertulis, bukan dari observasi langsung atau wawancara (Tjasmadi, 2022:15). Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, pencatatan, dan pengorganisasian informasi yang ditemukan dari berbagai sumber. Kemudian data dianalisis secara deskriptif untuk memetakan perkembangan gerakan mahasiswa, tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi, serta merumuskan implikasi strategis bagi keberlanjutan peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai kondisi aktual gerakan mahasiswa di era reformasi. Penekanan diberikan pada upaya untuk menyajikan interpretasi yang kritis, sekaligus menyusun kerangka pemahaman yang utuh terhadap dinamika sosial-politik yang melingkupi peran mahasiswa dalam konteks pembangunan bangsa saat ini.

Pembahasan

A. Gerakan dan Mahasiswa

Dalam dinamika perubahan sosial-politik Indonesia, mahasiswa secara historis telah memainkan peran strategis dalam setiap fase krusial pembangunan bangsa. Perjalanan panjang gerakan mahasiswa dari generasi 1908 hingga 1998 mencerminkan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai momen perubahan. Posisi mahasiswa sebagai pelopor perubahan telah menjadi ciri khas yang terus berulang dalam sejarah pergerakan nasional.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa gerakan mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Setiap bentuk perlawanan atau ekspresi politik mahasiswa merupakan respons terhadap situasi konkret yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pilihan strategi dan bentuk gerakan yang mereka gunakan sangat dipengaruhi oleh wacana dominan yang berkembang pada zamannya. Secara teoritis, gerakan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok

masyarakat sebagai respons atas ketimpangan atau kondisi sosial yang dianggap bermasalah. Dalam hal ini, gerakan mahasiswa merupakan manifestasi dari kehendak kolektif yang bertujuan untuk mendorong perubahan melalui tekanan sosial, baik terhadap negara maupun institusi lainnya. Mahasiswa bertindak bukan sebagai individu, tetapi sebagai kekuatan kelompok yang memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab historis.

Sebenarnya, terdapat beberapa unsur yang bisa dikatakan sebagai variabel utama konsep gerakan, sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh Timur Mahardika dalam pengertian gerakan, dimana gerakan mahasiswa berada pada salah satu variabel yang diantaranya adalah: 1. Keadaan masa kini yang dipandang buruk, menyimpan ketidakadilan, dan karena itu akan dirubah 2. Keadaan masa depan yang menjadi harapan, dalam hal ini diidentifikasi sebagai suatu keadaan yang lebih baik dan bermakna. 3. Pihak penguasa, rezim, sebagai penanggung jawab keadaan. Tidak bisa dihindari bahwa penguasa pada akhirnya harus menuai perlawanan atas tindakan atau keadaan yang diciptakannya. 4. Pihak yang melawan, yang menjadi kekuatan yang memiliki kepentingan untuk mendorong perubahan. 5. Dinamika konflik antara berbagai kekuatan yang ada (Muzakar, 2019:136-137).

Keberadaan mahasiswa sebagai bagian dari entitas intelektual menjadikan mereka sebagai motor penggerak dalam proses transformasi sosial. Sejarah mencatat bahwa baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, mahasiswa kerap menjadi inisiator ide-ide progresif. Mereka menyuarakan kepentingan rakyat, mengangkat isu-isu ketimpangan, serta menampilkan sikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap merugikan publik (Muzakar, 2019:134-135).

Dalam kerangka peran sosial, mahasiswa memiliki tiga fungsi utama yang sering dijadikan pijakan teoritik, yaitu sebagai agen kontrol sosial (*agent of social control*), agen perubahan (*agent of change*), serta sebagai cadangan pemimpin masa depan (*iron stock*). Ketiga peran ini menuntut integrasi antara kemampuan intelektual dan sensitivitas moral agar mahasiswa tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat secara luas.

Tantangan utama mahasiswa dewasa ini adalah bagaimana menggabungkan idealisme dengan realitas kampus dan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga harus tanggap terhadap perubahan sosial dan mampu membangun budaya kampus yang inklusif, harmonis, serta kritis terhadap kondisi eksternal. Keseimbangan antara peran akademik dan peran sosial menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut (Ways, 2016:221-222).

Jika diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan pola organisasinya, gerakan mahasiswa pasca-2000 terbagi menjadi tiga kategori: mahasiswa struktural, semi-struktural, dan otonom. Mahasiswa struktural adalah mereka yang tergabung dalam lembaga formal kampus seperti Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM), dengan dukungan administratif dan finansial dari institusi kampus. Kelompok semi-struktural meliputi aktivis organisasi ekstra-kampus seperti HMI, PMII, GMNI, IMM, dan sebagainya, yang memiliki struktur nasional hingga ke tingkat kampus. Sementara itu, kelompok otonom terdiri dari individu atau komunitas mahasiswa yang bergerak secara independen, biasanya berbasis pada isu-isu tertentu tanpa keterikatan pada struktur organisasi formal.(Muzakar, 2016:112).

B. Refleksi gerakan mahasiswa peristiwa Reformasi 1998

Dua dekade pasca Reformasi 1998, diskursus mengenai gerakan mahasiswa mengalami pergeseran. Muncul kritik yang menyatakan bahwa idealisme dan militansi mahasiswa telah mengalami penurunan signifikan. Banyak kalangan menilai bahwa mahasiswa saat ini lebih cenderung bersikap pragmatis dan individualistik dibandingkan generasi aktivis sebelumnya, terutama yang terlibat dalam gelombang perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Sosiolog Pam Nilan menyampaikan bahwa mahasiswa pascareformasi mengalami krisis identitas politik kolektif. Berbeda dengan mahasiswa era sebelumnya yang memiliki visi perjuangan bersama, generasi sekarang lebih menonjolkan agenda pribadi dan ekspresi individual. Hal ini menunjukkan pergeseran orientasi gerakan dari basis kolektif menuju preferensi yang lebih personal dan terfragmentasi (Santoso, 2016:121).

Juliausti, seorang peneliti media, juga menyoroti perubahan fungsi media alternatif dan pers mahasiswa setelah reformasi. Jika pada era pra-reformasi media mahasiswa menjadi alat advokasi dan ruang perlawanan terhadap hegemoni negara, maka pada era reformasi fungsinya mengalami degradasi menjadi sekadar media internal organisasi. Kekuatan media sebagai instrumen perubahan sosial pun ikut melemah.

Faktor internal seperti kebijakan pendidikan tinggi yang semakin menekankan efisiensi dan profesionalisme juga turut berperan dalam menurunnya intensitas gerakan mahasiswa. Mahasiswa didorong untuk menyelesaikan studi tepat waktu, menghadapi tekanan akademik yang tinggi, serta terbebani oleh biaya pendidikan yang kian mahal. Dalam situasi ini, ruang gerak untuk berorganisasi dan melakukan aktivisme menjadi sangat terbatas.

Peneliti Tumenggung dan Nungroho menggarisbawahi gejala pragmatisme yang tumbuh di kalangan mahasiswa, yang menurut mereka merupakan bagian dari stagnasi transisi politik Indonesia. Harapan besar terhadap demokratisasi pasca-Soeharto tidak sepenuhnya terwujud, bahkan dalam banyak aspek justru menghadirkan kebingungan arah serta kekecewaan terhadap proses demokrasi yang berlangsung secara elitis.

Refleksi terhadap gerakan mahasiswa pada masa Reformasi 1998 menunjukkan bahwa keberhasilan menumbangkan rezim otoriter tidak serta-merta diikuti dengan konsolidasi gerakan

yang kuat pada era setelahnya. Kekosongan ideologis, disorientasi politik, serta ketidaksiapan dalam membangun agenda sosial yang berkelanjutan menjadi tantangan utama yang dihadapi mahasiswa era reformasi dan sesudahnya (Santoso, 2016:122).

C. Kondisi Sosial Politik Pascakejatuhan Soeharto

Reformasi 1998 menandai awal dari perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru yang otoriter. Meskipun gerakan mahasiswa berhasil mendorong perubahan rezim, transformasi yang terjadi lebih bersifat prosedural dibandingkan substantif. Demokrasi yang lahir pascareformasi masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dalam hal konsolidasi institusional dan budaya politik (Heryanto, 2019:492).

Salah satu hasil utama reformasi adalah terbukanya ruang partisipasi politik yang lebih luas, termasuk melalui sistem desentralisasi pemerintahan. Namun, perluasan ruang demokrasi tersebut juga diiringi dengan fragmentasi kepentingan dan melemahnya kohesi antarwilayah. Gerakan mahasiswa yang sebelumnya bersifat nasional dan terorganisasi kini menghadapi tantangan dalam membangun solidaritas lintas isu dan daerah.

Di sisi lain, perubahan dalam sektor pendidikan turut memengaruhi karakter gerakan mahasiswa. Pendidikan tinggi semakin diarahkan pada orientasi pasar yang menekankan pada efisiensi dan kompetensi kerja. Hal ini secara tidak langsung membentuk kultur kampus yang kurang kondusif bagi tumbuhnya kesadaran kritis dan aktivitas sosial-politik mahasiswa (Syah, 2019:193).

Mahasiswa kini dihadapkan pada tekanan akademik dan beban biaya pendidikan yang tinggi, yang secara praktis mengurangi ruang dan waktu mereka untuk berorganisasi. Kegiatan aktivisme seringkali harus dikompromikan dengan tuntutan akademik dan kebutuhan ekonomi, sehingga menimbulkan dilema antara idealisme dan realitas.

Di samping itu, organisasi mahasiswa mengalami berbagai persoalan internal, seperti lemahnya sistem kaderisasi, minimnya data kajian berbasis lapangan, serta kurangnya jejaring komunikasi antarorganisasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas analisis dan lemahnya efektivitas gerakan, yang cenderung bersifat sporadis dan reaktif tanpa strategi jangka panjang.

Keseluruhan dinamika ini mencerminkan bahwa pascareformasi, meskipun ruang demokrasi terbuka lebih luas, tidak secara otomatis melahirkan gerakan mahasiswa yang lebih kuat. Justru, terdapat tantangan struktural dan kultural yang harus dihadapi untuk membangun kembali kekuatan gerakan mahasiswa yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman (Heryanto, 2019:493).

Beberapa faktor utama penyebab disorientasinya gerakan mahasiswa yaitu:

Pertama, perubahan fundamental sistem politik pasca reformasi 1998 dari rezim otoriter-sentralistik kepada demokrasi-desentralisasi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi gerakan mahasiswa. Sistem politik yang terbuka telah menciptakan kebebasan berekspresi masyarakat dan memberi kesempatan politik bagi lahirnya gerakan mahasiswa. Tantangannya yaitu dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi menjadikan pengambil kebijakan tidak hanya berada di pusat namun juga berada di daerah-daerah otonom.

Hal ini menyebabkan fokus isu mahasiswa terbagi antara isu-isu yang bersifat nasional dan isu-isu yang bersifat sektoral kedaerahan. Sehingga untuk isu-isu berskala nasional menjadi lebih sulit menciptakan perasaan yang sama antar daerah. Akan tetapi untuk isu-isu yang bersifat sektoral kedaerahan meskipun didukung kesempatan politik yang terbuka juga belum menunjukkan visi bersama yang hendak diwujudkan dalam gerakan mahasiswa. Terbukanya kesempatan politik memberi celah bagi lahirnya gerakan mahasiswa, namun peluang tersebut justru belum mampu dimanfaatkan sebagai motor gerakan mahasiswa. Mahasiswa justru masih terlihat gagap dan sedang mencari posisi seperti apa, format gerakan yang pas untuk mengambil peran seperti apa dalam sistem politik yang demokratis pasca reformasi.

Kedua, sistem pendidikan yang berorientasi dunia kerja telah merubah orientasi mahasiswa terhadap kondisi sosial politik di masyarakat. Tuntutan agar mahasiswa cepat menyelesaikan studinya dengan jadwal perkuliahan yang padat membuat kesempatan mahasiswa untuk melakukan kajian-kajian sosial semakin berkurang. Hal tersebut semakin mengurangi minat dan perhatian mereka seputar isu-isu sosial yang ada. Sehingga mahasiswa menjadi lemah secara kognisi dan kehilangan daya kritis karena ketidaktahuannya.

Selain itu adanya beberapa kampus yang melakukan larangan untuk berunjuk rasa membuat mahasiswa perlahan-lahan menjadi patuh dan takut untuk bersikap kritis. Faktor tersebut juga dirasakan dampaknya kepada minimnya pilihan kader potensial. Adanya kader yang cenderung memanfaatkan organisasi kemahasiswaan untuk mencapai kepentingan politik namun bukan untuk tujuan pergerakan politik atau sebagai alat perjuangan namun keuntungan pribadi.

Ketiga, permasalahan internal organisasi dalam hal sumber daya yaitu terkait dengan basis keanggotaan, jejaring komunikasi, dan kepemimpinan. Secara basis keanggotaan terdapat persoalan seperti ketidakdisiplinan anggota dan kurangnya rasa tanggung jawab. Hal ini menyita perhatian organisasi kemahasiswaan yang lebih disibukan dengan permasalahan internal sehingga kurangnya perhatian terhadap isu-isu diluar.

Dukungan keanggotaan banyak secara moral namun sedikit dalam tindakan di lapangan

karena kurang optimalnya proses kaderisasi membentuk militansi anggota. Kurang dimanfaatkannya teknologi informasi sebagai jejaring komunikasi dan belum adanya wadah pertemuan rutin antar lembaga mahasiswa untuk mendiskusikan isu-isu terkini menyebabkan tidak terbangunnya soliditas antar organisasi mahasiswa.

Keempat, minimnya kajian dan analisa terhadap suatu permasalahan. Hal itu dikarenakan kurangnya dukungan data investigasi lapangan yang membuat kajian mahasiswa tidak mendalam dan cenderung bersifat normatif sehingga aksi-aksi yang dilakukan lebih sering bersifat reflektif dalam bentuk aksi-aksi solidaritas. Kurangnya kajian menyebabkan pembingkaihan isu yang dilakukan tidak maksimal dan tidak mampu meyakinkan target peserta gerakan sehingga gerakan nyata yang harus dilakukan menjadi kabur.

Kondisi demikian menyebabkan gerakan yang dilakukan menjadi tidak konsisten, reaktif, dan rendahnya partisipasi gerakan mahasiswa. Kondisi yang lebih buruk adalah adanya kecurigaan antar lembaga mahasiswa yang dianggap membawa kepentingan politik tertentu hal tersebut terjadi karena organisasi kemahasiswaan kurang mengedepankan gagasan-gagasan dan ide-ide yang konstruktif untuk mengcounter isu-isu politik sebagai bentuk pencerdasan bagi masyarakat awam (Muzakar, 2016:117-119).

D. Gerakan-gerakan Mahasiswa Pascareformasi

Belakangan ini, gerakan mahasiswa kembali muncul ke permukaan setelah pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebagaimana biasanya, mahasiswa menolak rencana itu dengan berbagai aksi demonstrasi. Gerakan mahasiswa setelah era Reformasi menunjukkan kecenderungan stagnasi dalam hal inovasi strategi maupun orientasi perjuangan. Meski aksi-aksi protes masih berlangsung, pola gerakan yang digunakan cenderung repetitif dan kurang responsif terhadap dinamika sosial-politik yang semakin kompleks. Aksi demonstrasi yang bersifat seremonial masih menjadi pendekatan dominan, namun tidak selalu disertai dengan kedalaman kajian maupun narasi perjuangan yang terstruktur (Iswanto, 2015:152).

Pada akhir 2011, Harian ini membuat dua tulisan mahasiswa yang sangat bernas memberikan otokritik terhadap gerakan mahasiswa. Pertama, Herlianto menulis “Mahasiswa:Gerakan dan Harapan” diterbitkan oleh Kompas. Herlianto menyebutkan, persoalan mendasar gerakan mahasiswa saat ini adalah lunturnya semangat kolektivitas gerakan mahasiswa, tidak adanya “musuh bersama”, dan mundurnya gerakan berskala nasional. sehingga spesialisasi gerakan melunturkan kolektivitas gerakan mahasiswa. Ditambah dengan politik kampus yang memabukkan mahasiswa.

Otokritik kedua muncul dari Okki Sutanto. Tulisannya “Mahasiswa dan kolaborasi” diterbitkan oleh Kompas, yang sekaligus menjadi kritik bagi analisis Herlianto. Okki menyebutkan, kegagalan gerakan mahasiswa saat ini disebabkan oleh pola gerakan yang masih mengadopsi cara lama, pola perlawanan masa Orde Baru. Gerakan mahasiswa juga cenderung menempatkan kekuasaan sebagai musuh, dan membuat garis demarkasi dengan pemerintah.

Banyak pihak memberikan kritik, pola gerakan mahasiswa saat ini terasa usang dan tidak mampu menjawab kebutuhan zaman. Karena itu, perlu evaluasi kritis sekaligus inovasi dalam membangun gerakan mahasiswa yang lebih efektif dan massif (Iswanto, 2015:153). Sebagai anak zaman, gerakan mahasiswa juga bergerak seiring dengan tuntutan zaman. Dalam konteks Indonesia, khususnya gerakan mahasiswa, ada beberapa poin yang bisa dijadikan acuan gerakan, antara lain:

1. Gerakan Mahasiswa mesti menyiapkan ruang yang kondusif untuk membekali komunitasnya dengan keunggulan komparatif, agar kelak mampu eksis dalam kompetisi pasar politik dan pasar ekonomi yang semakin terbuka dan ketat.
2. Gerakan mahasiswa yang secara ideologis memiliki keberagaman (pluralisme ideologi), sudah mestinya mampu menemukan “sinergi kolektif” melalui tradisi “komunikasi tanpa prasangka” demi memperjuangkan kepentingan bangsa. Dalam diksi yang lain, sentimen ideologis kelompok atau golongan, jangan malah mengalahkan kepentingan kolektif kita sebagai bangsa.
3. Gerakan mahasiswa mesti mengambil prakarsa untuk menstimulasi, menjaga, dan mengawal berlangsungnya “demokrasi politik” dan “demokrasi ekonomi”, melalui pengumpulan varian isu seperti supermasi hukum, kebebasan berserikat/berkumpul, demokratisasi politik dan demokratisasi ekonomi merupakan pergulatan permanen dalam perjalanan eksistensi bangsa-bangsa di muka bumi ini.
4. Gerakan mahasiswa mutlak melakukan reorientasi dalam agenda gerakan atau perjuangan kolektifnya. Sering perubahan konfigurasi dan budaya politik nasional, tema-tema gerakan yang menjadikan “orang/figur sebagai musuh bersama” tampaknya kurang relevan atau kontekstual lagi. Hendaknya, gerakan mahasiswa lebih memberikan atensinya terhadap tema-tema mendasar seperti ancaman disintegrasi nasional, disparitas antar wilayah, bisa otonomi daerah yang memunculkan sentimen/ego daerah yang justru mengancam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD’45.
5. Gerakan mahasiswa sudah semestinya mentradisikan motivasi perjuangan yang meletakkan loyalitas kepada cita-cita, bukan kepada orang. Gerakan mahasiswa akan kehilangan jati dirinya ketika ia memainkan perannya sebagai subordinasi dari orang per

orang, dan bakal terkubur eksistensi sejarahnya apabila ia membiarkan dirinya menjadi alat penguasa, siapa pun pemegang kekuasaan itu (Syah, 2019:194).

E. Gerakan Ekstra Parlemen Sebagai Sebuah Strategi

Dikatakan gerakan mahasiswa ekstra parlementer, karena gerakan mahasiswa ini merupakan aktivitas/gerakan yang diselenggarakan oleh mahasiswa diluar institusi parlemen/institusi negara untuk memberikan bantuan dan pembelaan (advokasi) terhadap kelompok/masyarakat yang dirugikan atas pelaksanaan kebijakan penguasa yang dirasa tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Gerakan mahasiswa ekstra parlementer yang dilakukan merupakan gerakan yang strategis, karena dari segi pendidikan formalnya, mahasiswa ada pada jenjang terakhir. Mahasiswa memiliki seperangkat ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk “menilai kebenaran”. Oleh karena itu mahasiswa akan memiliki komitmen untuk memperjuangkan kebenaran itu. Sehingga apabila ada sesuatu yang tidak benar, mahasiswa akan fokus untuk memperbaikinya. Pendekatan mahasiswa adalah pendekatan yang ideal, gerakan yang ditujukan untuk kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Idealisme mahasiswa akan terusik apabila terdapat “penyimpangan” pada masyarakat. Itulah sebabnya mahasiswa disebut sebagai agent of change (agen perubahan) dan agent of control (agen pengawasan) terhadap apa-apa yang dianggap ketidakadilan, penindasan dan diskriminasi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

Gerakan mahasiswa ekstra parlementer merupakan gerakan kerakyatan dan gerakan moral yang berbicara tentang kasus-kasus riil yang terjadi di masyarakat sekitar dan Negara. Gerakan ekstra parlementer mahasiswa bukan hanya sebuah gelombang demonstrasi saja, namun sebuah gerakan lokal yang dikemas dan dapat menjadi sebuah gerakan Nasional bahkan Internasional. Gerakan yang konsisten dalam mencapai tujuan sehingga dapat mempengaruhi pengambil kebijakan/mengubah kebijakan publik agar tidak menindas, merugikan dan atau memberikan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat tertentu.

Gerakan mahasiswa ekstra parlementer juga meliputi bagaimana menggalang aliansi taktis dan aliansi strategis dalam mencapai tujuan gerakan tersebut. Gerakan ini juga harus memerhatikan bagaimana memilih isu publik dan mengelola opini publik sehingga dapat menjadi “bola salju”. Gerakan mahasiswa ekstra parlementer juga berbicara strategi dan taktiknya sehingga apa yang menjadi fokus gerakan itu tercapai. Sederhananya adalah bagaimana gerakan mahasiswa ini menjadi sebuah gerakan yang benar-benar terorganisir, bukan gerakan yang spontan dan sporadis, gerakan spontan dan sporadis.

Gerakan ekstraparlementer ini bisa juga diartikan dari perwujudan partisipasi politik aktif oleh mahasiswa. Menurut Huntington dan Nelson, pengertian partisipasi politik adalah kegiatan

warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa (Huntington & Nelson, 1990:9-10).

Kesimpulan

Gerakan mahasiswa memiliki posisi historis dan strategis dalam mendorong perubahan sosial-politik di Indonesia. Sepanjang sejarah, mahasiswa berperan sebagai pelopor dalam berbagai momentum penting, mulai dari kebangkitan nasional hingga Reformasi 1998. Posisi tersebut menjadikan mahasiswa tidak hanya sebagai pelaku akademik, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Namun demikian, kondisi gerakan mahasiswa pascareformasi menunjukkan berbagai tantangan serius yang memerlukan penanganan strategis. Tantangan tersebut meliputi melemahnya konsolidasi organisasi, minimnya basis kajian dalam setiap gerakan, serta terjadinya pergeseran orientasi dari idealisme kolektif ke arah pragmatisme individual. Situasi ini menyebabkan gerakan mahasiswa kehilangan daya dorong yang kuat dan cenderung simbolik.

Agar gerakan mahasiswa tetap relevan dalam konteks demokrasi kontemporer, diperlukan reorientasi menyeluruh, baik dari sisi ideologis maupun strategis. Mahasiswa harus memperkuat konsolidasi internal, memperkaya basis intelektual dengan data yang akurat, serta membangun jaringan kolaborasi yang melintasi batas organisasi dan ideologi. Dengan demikian, mereka dapat kembali memainkan peran sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial dalam proses pembangunan nasional.

Kesimpulannya, Gerakan mahasiswa tetap menjadi elemen penting dalam dinamika sosial-politik Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan berupa melemahnya konsolidasi, pragmatisme gerakan, dan tekanan sistem pendidikan, mahasiswa masih memiliki potensi sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Untuk menjaga relevansinya di era pascareformasi, gerakan mahasiswa memerlukan reorientasi ideologis dan pembaruan strategi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Heryanto, Gun Gun, *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, Yogyakarta: IRCiSoD 2019.
- Iswanto, Anhar Putra *Nihilisme Demokrasi dan Keadaban Politik Gagasan Keadilan Politik dan Etika Demokrasi*, Malang: Intelegensia Media 2015.
- Muzakar, Abdullah, *Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Karl Marx*, Lombok: Yayasan Suluh

- Rinjani 2019.
- Purba, Djasarmen Kaki Langit Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Sempu 2018.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Santoso, Widjajanti Mulyono, *Ilmu Sosial: Perkembangan dan Tantangan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneisa 2016.
- Syah, Iskandar, *Sejarah Nasional Indonesia*, Yogyakarta: Suluh Media 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016
- Tjasmadi, Maria Patricia, *Proposal Metodologi Penelitian Teologi*, peny., Adi Putra Jakarta: Penerbit Views, 2022.
- Ways, Muliansyah Abdurrahman, *Serial Sosial-Politik Lokal di Indonesia Demokrasi*, Malang: Inteligensia Media 2016.